



2019

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
UNIT PELAYANAN KESEHATAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN**

KATA PENGATAR

Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini berisi uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan, hambatan dan permasalahan yang dialami UPK dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategi Bisnis. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik diharapkan mendorong terwujudnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja UPK dapat memberikan manfaat maupun informasi mengenai evaluasi kinerja selama tahun 2019 bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 29 Januari 2020

Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



drg. Inda Torisia Hatang, MKM

NIP 197307132002122005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Laporan.....	2
C. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
D. Ruang Lingkup.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Perencanaan Kinerja.....	6
B. Perjanjian Kinerja.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Pengukuran Kinerja.....	9
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	10
1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan.....	10
2. Peningkatan Peran dan Fungsi Unit Pelayanan Kesehatan.....	24
C. Sumber Daya.....	31
1. Sumber Daya Manusia.....	31
2. Sarana dan Prasarana.....	34
3. Sumber Daya Keuangan.....	35
BAB IV PENUTUP.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Perjanjian Kinerja.....	8
Tabel 3. 1 Tingkat Capaian Kinerja	10
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Pengembangan Tata Kelola Kepuasan Pasien Unit Pelayanan Kesehatan	12
Tabel 3. 3 Survey Kepuasan Penunjang Medik Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019	14
Tabel 3. 4 Penyerapan Anggaran Obat, Reagen, Bahan Habis Pakai, Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Tahun 2018 dan 2019.....	15
Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Komplain yang ditindaklanjuti Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 dan Tahun 2019	16
Tabel 3. 6 Pelatihan Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019	17
Tabel 3. 7 Capaian Indikator pelatihan Berkesinambungan Bagi Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan	19
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Pelatihan Berkesinambungan bagi Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan	20
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019 dan Tahun 2018	21
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Tata Kelola UPK dengan Baik	23
Tabel 3. 11 Jumlah Tenaga di Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019	32
Tabel 3. 12 SDM Unit Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	32
Tabel 3. 13 SDM Unit Pelayanan Kesehatan Th.2019 berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	33
Tabel 3. 14 SDM Unit Pelayanan Kesehatan Th.2019 berdasarkan Jabatan	33
Tabel 3. 15 Belanja Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2019	35
Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	36

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Indikator Kinerja Kepuasan Pasien.....	12
Grafik 3. 2 Kepuasan Pasien di Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019	13
Grafik 3. 3 Penyerapan Anggaran Bulanan	22
Grafik 3. 4 Kunjungan Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2019.....	25
Grafik 3. 5 Kunjungan per Poli Tahun 2019 dan 2018.....	26
Grafik 3. 6 10 Penyakit Terbanyak Tahun 2019	27

IKHTISAR EKSEKUTIF

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) merupakan salah satu unit pelayanan vertikal di bidang pelayanan kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012.

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat, pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat. Pelayanan yang terdapat pada UPK antara lain: pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, dan pelayanan fisioterapi.

Target kinerja terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan dengan indikator kinerja pengembangan tata kelola kepuasan pasien mencapai 93 % dari target 90%, komplain yang ditindaklanjuti mencapai 100% dari target 90%. Terwujudnya tata kelola UPK dengan baik dari indikator kinerja realisasi anggaran, laporan keuangan tepat waktu mencapai 98,25% dari target 95%. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM dengan indikator kinerja yaitu pelatihan berkesinambungan bagi pegawai UPK mencapai 97% dari target 100% dan pelatihan BHD bagi pegawai Kemenkes mencapai 102% dari target 100%.

Realisasi penyerapan anggaran DIPA Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI tahun 2019 sebesar Rp. 19.298.234.031,- (96.45%) dari pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 20.008.606.000,-. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan rawat jalan UPK mencapai 25.065 kunjungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. UPK merupakan unit pelayanan teknis di lingkungan Kemenkes yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. UPK adalah metamorfosa dari Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) yang dahulu dikelola oleh Biro Kepegawaian Kemenkes dengan tujuan mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat umum.

UPK memiliki dua klinik yaitu Klinik Pratama dan Klinik Utama. Klinik pratama melayani poli umum dan poli gigi. Sedangkan Klinik Utama memiliki pelayanan spesialisik yaitu spesialis jantung, spesialis paru, spesialis rehab medik dan spesialis okupasi klinis. Klinik Utama juga memiliki pelayanan penunjang yakni radiologi, laboratorium, farmasi, fisioterapi dan pelayanan unit gawat darurat.

Untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Klinik Pratama UPK telah melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga masyarakat di sekitar lingkungan Kemenkes seperti perkantoran dan rumah dinas pejabat juga bisa mendapatkan pelayanan di UPK.

Dengan ditetapkannya Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kementerian Kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis, maka Unit Pelayanan Kesehatan sebagai satuan kerja mempunyai kewajiban untuk membuat LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UPK setiap tahun menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kementerian Kesehatan RI.

B. Maksud dan Tujuan Laporan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPK Tahun 2019, yaitu:

1. Sebagai instrumen pengukuran (indikator) dan evaluasi kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengacu pada renstra.
2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan secara sistematis untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan selama setahun.
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan/kegagalan dari proses kinerja yang sudah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan di masa datang.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok Unit Pelayanan Kesehatan

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan mempunyai Tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat, pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat sekitar.

2. Fungsi Unit Pelayanan Kesehatan yaitu menyelenggarakan:
 - a. Pelaksanaan pelayanan medis;
 - b. Pelaksanaan pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelaksanaan pelayanan laboratorium;
 - d. Pelaksanaan pelayanan radiologi;
 - e. Pelaksanaan pelayanan fisioterapi;
 - f. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan administrasi umum.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN KESEHATAN



D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan berkala Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2019 meliputi:

1. BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Unit Pelayanan Kesehatan, serta sistematika penulisan pelaporan.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, realisasi anggaran, serta sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan.

4. BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sasaran Strategis Unit Pelayanan Kesehatan termuat dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB). RSB merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan, yang disusun oleh sebuah tim dengan melibatkan seluruh manajemen puncak di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Adapun gambaran umum dari RSB Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Visi:

“Menjadi Klinik Utama Percontohan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Terbaik bagi Karyawan dan Masyarakat Umum”

2. Misi:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pelayanan yang bermutu;
- d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3. Tata Nilai:

- a. Insan Profesional
- b. Berakhlak
- c. Teamwork
- d. Ikhlas

4. Tujuan Rencana Strategi Bisnis UPK Kemenkes:

- a. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- b. Sebagai dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- c. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam yang merupakan indikasi program APBN.
- d. Tersedianya indikator penilaian evaluasi kinerja Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- e. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam rangka peningkatan upaya kesehatan perorangan yang berorientasi pada pelayanan *stakeholder oriented* prima berdasarkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik dan bersih serta terwujudnya komitmen bersama Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari UPK dalam indikator kinerja dan pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2019

yang mengacu pada Rencana Strategi Bisnis UPK Tahun 2015 – 2019.

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Table 2. 1 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan	Pengembangan tata kelola kepuasan pasien	90%
		Komplain yang Ditindaklanjuti	90%
2	Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM	Pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes	100%
		Pelatihan bantuan hidup dasar bagi pegawai Kementerian Kesehatan	100%
3	Terwujudnya tata kelola UPK dengan baik	- Realisasi anggaran, laporan keuangan tepat waktu	95%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2006). Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting sebagai bahan evaluasi terhadap capaian atas target yang telah disepakati sehingga diketahui permasalahan dan dapat dilakukan bahan pertimbangan untuk pencapaian target di tahun yang akan datang. Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Pasal 1 butir 2, Permen PAN No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah).

Tingkat capaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tingkat Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan	Pengembangan tata kelola kepuasan pasien	90%	93%
		Komplain yang Ditindaklanjuti	90%	100%
2.	Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM	Pelatihan berkesinambungan bagi pegawai UPK	100%	97%
		Pelatihan BHD bagi pegawai Kemenkes RI	100%	102%
3.	Terwujudnya tata kelola UPK dengan baik	Realisasi anggaran, laporan keuangan tepat waktu	95%	98,25%

B. Analisis Pencapaian Kinerja

1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan

Pencapaian indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang pertama yaitu terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan. Sasaran ini memiliki dua indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran tersebut. Indikator dan

capaian dari indikator pada sasaran strategis terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut:

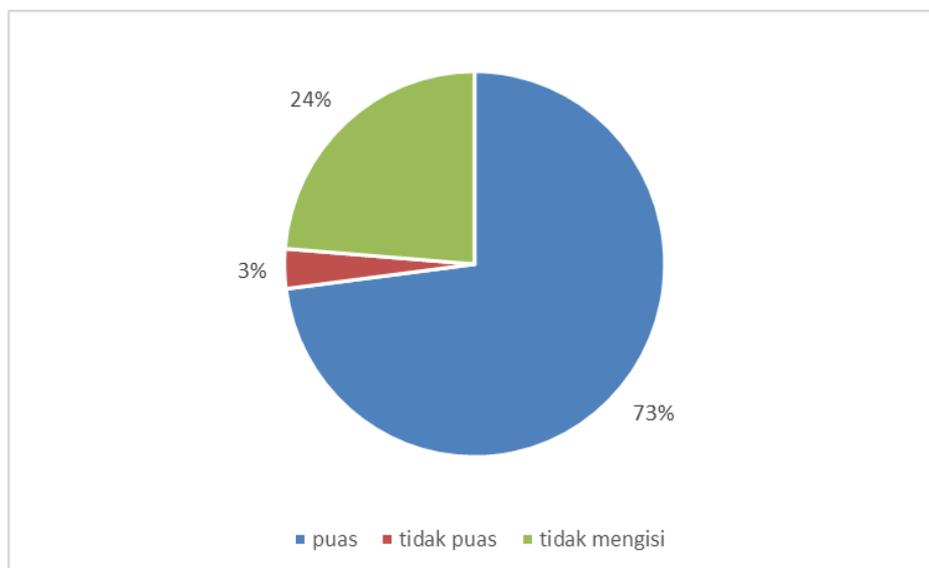
i. Pengembangan Tata Kelola Kepuasan Pasien

Secara definisi, pengembangan tata kelola kepuasan pasien dengan baik yang tertuang dalam Rencana Strategi Bisnis Unit Pelayanan Kesehatan adalah kepuasan pasien terhadap pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang, dan sarana prasarana di Unit Pelayanan Kesehatan yang diukur berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan. Terdapat perubahan definisi operasional terkait indikator tata kelola kepuasan pasien yang sebelumnya yaitu terkait realisasi anggaran obat, reagen, bahan habis pakai, dan pemeliharaan alat kesehatan serta kalibrasi alat kesehatan.

Kepuasan pasien merupakan *outcome* dari layanan kesehatan yang baik. Kepuasan pasien merupakan salah satu tujuan dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dapat dibuktikan bahwa pasien atau masyarakat yang mengalami kepuasan terhadap layanan kesehatan yang diselenggarakan cenderung mematuhi nasihat, setia, atau taat terhadap rencana pengobatan yang telah disepakati. Sebaliknya pasien yang tidak merasakan kepuasan atau mengalami kekecewaan sewaktu menggunakan layanan kesehatan cenderung tidak mematuhi rencana pengobatan, tidak mematuhi nasihat, tidak mematuhi rencana pengobatan, berganti dokter atau pindah fasilitas layanan kesehatan. Oleh sebab itu, reorientasi tujuan dari organisasi layanan kesehatan agar semakin terfokus pada keinginan pasien (Pohan, 2006).

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian indikator kinerja utama terkait pengembangan tata kelola kepuasan pasien adalah sebagai berikut:

Grafik 3. 1 Indikator Kinerja Kepuasan Pasien



Berdasarkan grafik 3.1 terlihat bahwa sebagian besar pasien puas terhadap pelayanan di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yaitu sebesar 73%. Masih terdapat banyak pasien yang tidak mengisi survey yang telah diberikan sehingga tidak mendapatkan data keseluruhan. Jika dibandingkan dengan target capaian indikator kinerja pengembangan tata kelola kepuasan pasien tahun 2019 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Pengembangan Tata Kelola Kepuasan Pasien Unit Pelayanan Kesehatan

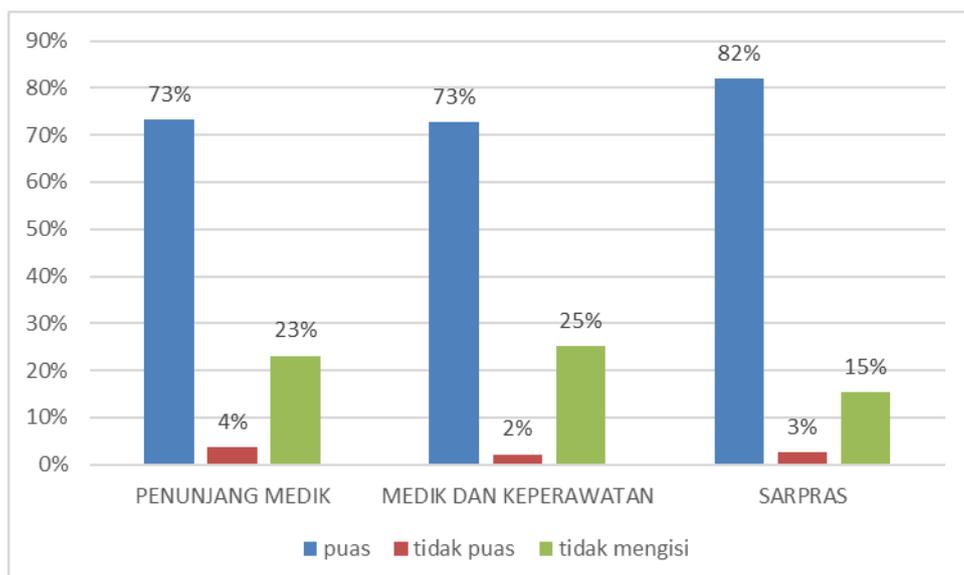
Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengembangan tata kelola kepuasan pasien	90%	93%	103,3%	85%	96%	112,94%

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa indikator kinerja pengembangan tata kelola kepuasan pasien telah mencapai target Tahun 2019 dengan nilai capaian sebesar 93%. Terjadi penurunan capaian dari tahun lalu. Kepuasan pasien di Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI diukur dengan pencapaian realisasi obat, reagen, BHP, kalibrasi dan alat kesehatan.

Indikator kepuasan yang diukur diantaranya adalah kepuasan terhadap pelayanan medik dan keperawatan, kepuasan terhadap penunjang medik, dan kepuasan terhadap sarana prasarana yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan. Hasil analisis berdasarkan survey yang disebarakan kepada pasien.

Berikut hasil analisis kepuasan pasien di Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019:

Grafik 3. 2 Kepuasan Pasien di Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019



Berdasarkan grafik 3.2 terlihat bahwa sebagian besar pasien puas dengan pelayanan di Unit Pelayanan

Kesehatan baik dari pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik, maupun dari segi sarana dan prasarana, namun masih banyak pasien yang belum mengisi survey tersebut. Kepuasan pasien tertinggi yaitu kepuasan pasien terhadap sarana dan prasarana di UPK pada tahun 2019.

Tabel 3. 3 Survey Kepuasan Penunjang Medik Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019

No	Unit Kerja	Puas	Tidak Puas
1	Pendaftaran	151	3
2	Laboratorium (petugas)	128	7
3	Laboratorim (reagen)	100	8
4	Fisioterapi	115	9
5	Farmasi (petugas)	115	6
6	Farmasi (obat)	92	8
7	Radiologi	89	2

Berdasarkan data kuesioner pada tabel 3.3 menunjukkan bahwa penyumbang persentase terbesar pada kurangnya kepuasan pasien pada penunjang medik yaitu terhadap pelayanan fisioterapi sebanyak 9 orang pasien tidak puas selama tahun 2019.

Kepuasan pasien merupakan salah satu *outcome* dari sarana prasarana yang baik. Data penyerapan anggaran tata kelola kepuasan pasien meliputi anggaran pengadaan obat, reagen, dan bahan habis pakai serta pemeliharaan alat dan kalibrasi di Unit Pelayanan Kesehatan. Berikut realisasi anggaran tata kelola kepuasan pasien tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Penyerapan Anggaran Obat, Reagen, Bahan Habis Pakai, Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Tahun 2018 dan 2019

No.	Jenis Pengadaan	Tahun 2019			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Obat-obatan	85	99.40	117.00	85	99.96	117,60
2	Reagen	85	75.15	88.41	85	99.99	117,64
3	Bahan Habis Pakai	85	94.50	111.17	85	99.88	117,50
4	Kalibrasi Alat	85	99.10	116.58	85	92,21	108,48
5	Pemeliharaan Alkes	85	96.56	113.60	85	99,94	117,58
RATA-RATA		85	92.94	109.35	85	99,72	117,32

Berdasarkan tabel 3.4 terkait data penyerapan anggaran obat, reagen, dan Bahan Habis Pakai terlihat bahwa penyerapan anggaran untuk pengadaan penunjang medik rata-rata mencapai 92.94%. Penyerapan ini sudah melebihi target yang ada yaitu sebesar 85%.

ii. **Komplain yang Ditindaklanjuti**

Komplain adalah bentuk ekspresi formal tentang ketidaksesuaian atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek yang diterima seseorang. Sebagai institusi yang bergerak dibidang pelayanan, Unit Pelayanan Kesehatan sangat mungkin menerima komplain dari pasien yang ditangani. Adanya komplain yang masuk dapat menjadi masukan bagi Unit Pelayanan Kesehatan untuk melakukan perbaikan di tahun mendatang. Berikut persentase komplain yang ditindaklanjuti di Unit Pelayanan Kesehatan di tahun

2019 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018:

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Komplain yang ditindaklanjuti Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 dan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Komplain yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%	85%	95%	111,76%

Berdasarkan tabel 3.5 terlihat bahwa indikator kinerja komplain yang ditindaklanjuti telah tercapai dengan nilai capaian sebesar 100%. Pencapaian ini naik sebesar 5% dibandingkan dengan tahun lalu.

Sepanjang tahun 2019, Unit Pelayanan Kesehatan menerima 9 komplain. Komplain yang masuk ke Unit Pelayanan Kesehatan selalu diupayakan untuk ditindaklanjuti.

b. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang kedua yaitu terwujudnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia. Sasaran ini memiliki dua indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran tersebut. Indikator dan capaian dari indikator pada sasaran strategis peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Berkesinambungan Bagi Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan

Implementasi indikator ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada pegawai Unit Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan keterampilan sesuai bidang profesinya agar selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Peningkatan kapasitas telah diselenggarakan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan. Salah satu pelatihan yang diadakan untuk seluruh pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yaitu berupa Pelatihan Pelayanan Prima bekerjasama dengan Service Quality Centre Indonesia (SQCI) pada tanggal 12 Oktober 2019 di Hotel Sultan Jakarta serta Pelatihan Service Excellent bekerjasama dengan ESQ Indonesia di Hotel J.W. Marriot Jakarta pada tanggal 7 Desember 2019 dengan tema Pelayanan Maksimal Melayani Dengan Hati. Namun terdapat satu orang yang tidak mengikuti kedua pelatihan tersebut.

Selain itu ada beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh pegawai UPK dalam meningkatkan kemampuannya, antara lain:

Tabel 3. 6 Pelatihan Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019

No	Nama Pegawai	Kegiatan
1.	dr. Endriana S. Lubis, Sp.OK, MKK	The 3 rd AIR Pneumo Training and Workshop on Asian Intensive Reading of ILO Radiograph of Pneumoconiosis
2.	Indah Stefiastuti Rahayu	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Nama Pegawai	Kegiatan
3.	Anisa Dwi Silvia Fisudurini	Pelatihan dan Uji Kompetensi Flebotomi
4.	dr. Khairunnisa	Pelatihan Dokter Safety
5.	Evi Wulandari	ACL for Nurse
6.	Eza Pramedia	BTCLS
7.	Shinta Indah Pratiwi	BTCLS
8.	Catur Setia Dewi	TITAFI XXXIII
9.	Tri Tungga Dewi Kusumawati	TITAFI XXXIII
10.	Mika Susianti	CBWCN (Perawatan Luka)
11.	Sri Endang Pangestuti	CBWCN (Perawatan Luka)
12.	Lestari	CBWCN (Perawatan Luka)
13.	Ahmad Fauzan	Seminar Nasional dan Workshop Optimalisasi Rekam Medis Elektronik Sebagai Pendukung Keputusan Klinis Untuk Menjamin Mutu & Keselamatan Pasien
14.	dr. D Wahyuni, SpKFR	Overcoming Disaster, Winning Over Disability & Others Physical Medicine and Rehabilitation Updates
15.	Mohammad Alif Nur Fathoni	Pengembangan Kompetensi Radiografer di Bidang Radiodiagnostik, Imejing, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0
16.	dr. Rini Haryanti	Workshop EKG
17.	Yuni Asri Sembiring	Pelatihan Quality Control Laboratorium
18.	dr. Betriza, SpJP	2 nd Airlangga Cardiology Expert Meeting: What Trends Are Ahead & What Should Be Left

No	Nama Pegawai	Kegiatan
19	Siti Khadijah, Apt.,MM	Empowering Pharmacist in The Era of Change
20	Nur Chasanah, Apt	Empowering Pharmacist in The Era of Change
21	Citra Sri Martani	K3 di Laboratorium

Target pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan adalah 100%. Berikut pencapaian atas indikator pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan:

Tabel 3. 7 Capaian Indikator pelatihan Berkesinambungan Bagi Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelatihan Berkesinambungan bagi Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan	100%	97%	97%	90%	100%	111,11%

Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2019 sebesar 97%. Capaian belum memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 100%. Kendala-kendala yang dihadapi dalam merealisasikan pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan adalah pegawai yang bersangkutan sedang ada halangan untuk mengikuti pelatihan.

2. Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi Pegawai Kementerian Kesehatan RI

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai Kementerian Kesehatan

untuk mengikuti pelatihan Bantuan Hidup Dasar, dengan harapan agar setiap orang yang telah diberikan pelatihan BHD dapat memberikan pertolongan minimal untuk dirinya sendiri maupun orang lain jika ada seorang yang memerlukan tindakan cepat. Peserta yang diundang adalah ajudan menteri, PNS, Satpam, tenaga honorer dengan total jumlah peserta selama tahun 2019 sebanyak 244 peserta. Target pelatihan BHD bagi Pegawai Kementerian Kesehatan tahun 2019 adalah sebanyak 240 orang. Pencapaian atas indikator Pelatihan Bantuan Hidup Dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Pelatihan Berkesinambungan bagi Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelatihan BHD bagi Pegawai Kemenkes RI	100%	102%	102%	90%	100%	111,11%

Pada tabel 3.8 menunjukkan bahwa indikator pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi pegawai Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 ini realisasi yang dicapai sebesar 102% dari target 100% yang ingin dicapai. Capaian ini sudah melebihi target yang telah ditentukan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam merealisasikan pelatihan bantuan hidup dasar bagi pegawai Kementerian Kesehatan adalah:

- a) Pada tahun 2019 sistem pelaksanaan kegiatan menjadi 12 kali pelaksanaan dalam setahun dengan mengundang 20 peserta tiap kali kegiatan. Namun pada saat kegiatan dilaksanakan untuk peserta yang

hadir tidak sesuai dengan target yang diharapkan karena terkendala oleh adanya kegiatan atau dinas luar yang dilakukan oleh unit kerja yang diundang sehingga untuk dapat mencapai target maka Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menambah peserta dari pegawai *outsourcing* di lingkungan Kementerian Kesehatan (satpam, kantin, TPA, *cleaning service*).

c. Terwujudnya Tata Kelola Unit Pelayanan Kesehatan dengan baik

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang ketiga yaitu terwujudnya tata kelola Unit Pelayanan Kesehatan dengan baik. Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator realisasi anggaran dan laporan keuangan tepat waktu. Realisasi anggaran Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019 dan Tahun 2018

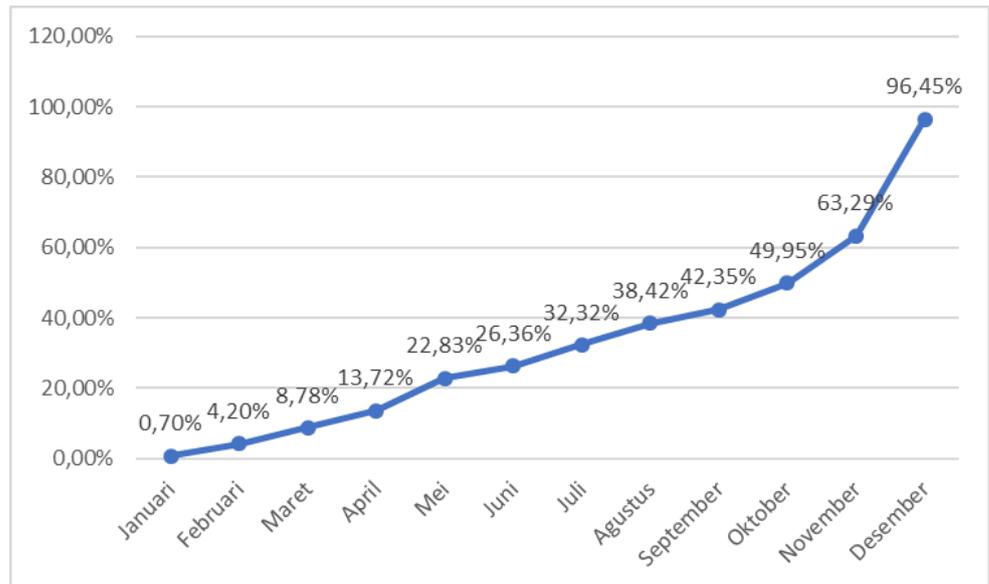
URAIAN	Tahun 2019			Tahun 2018		
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	5.895.758.000	5.680.036.381	96,34	5.264.105.000	5.199.035.973	98,76
Belanja Barang	6.638.944.000	6.368.355.830	95,92	4.145.568.000	4.104.539.755	99,01
Belanja Modal	7.473.904.000	7.249.841.820	97,00	1.587.550.000	1.332.178.704	83,91
Jumlah	20.008.606.000	19.298.234.031	96,45	10.997.223.000	10.635.754.432	96,71

Pada tabel 3.9 terlihat bahwa terdapat tambahan anggaran sampai 82% dibandingkan dengan tahun 2018. Realisasi paling kecil pada tahun 2019 terdapat pada belanja

barang. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pada belanja barang.

Penyerapan anggaran di Unit Pelayanan Kesehatan perbulan sebagai berikut:

Grafik 3. 3 Penyerapan Anggaran Bulanan



Berdasarkan grafik 3.3 terlihat bahwa setiap bulan terjadi peningkatan dalam penyerapan anggaran. Penyerapan terbanyak terjadi pada Bulan Desember yaitu sebanyak 33.16% yang disumbang oleh pembayaran realisasi belanja modal alat kesehatan APBNP dan realisasi pekerjaan renovasi tahap 1 dan tahap 2.

Laporan keuangan Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2019 sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 100% Laporan Keuangan yang dilakukan sepanjang Tahun 2019 tepat waktu. Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) sudah tepat waktu yaitu 22 kali dalam setahun, bahkan revolving dapat dilakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Selain itu, rekonsiliasi dengan KPPN sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPPN.

Capaian dari indikator pada sasaran strategis tata kelola UPK dengan baik berdasarkan hasil realisasi anggaran pada tabel 3.8 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Tata Kelola UPK dengan Baik

Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi Anggaran, laporan keuangan tepat waktu	95%	98,25%	102,10%	92%	98,35%	105,12%

Pada tabel 3.10 diatas terlihat bahwa realisasi anggaran pada tahun 2019 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 98,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, terdapat penurunan presentase realisasi anggaran sebesar 0,10% (tahun 2018 sebesar 98,35%). Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Penambahan anggaran APBNP
- b. Penurunan pengadaan belanja barang untuk efisiensi barang TA 2019

Meskipun terjadi peningkatan dalam realisasi anggaran tahun 2019, terdapat pula kendala yang dihadapi yaitu terkait perubahan jadwal kegiatan dari rencana yang sudah ditetapkan karena menunggu proses DIPA.

Laporan keuangan Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2019 sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 100% Laporan Keuangan yang dilakukan sepanjang Tahun

2019 tepat waktu. Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) sudah tepat waktu yaitu 22 kali selama satu tahun, revolving dapat dilakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Selain itu, rekonsiliasi dengan KPPN sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPPN.

2. Peningkatan Peran dan Fungsi Unit Pelayanan

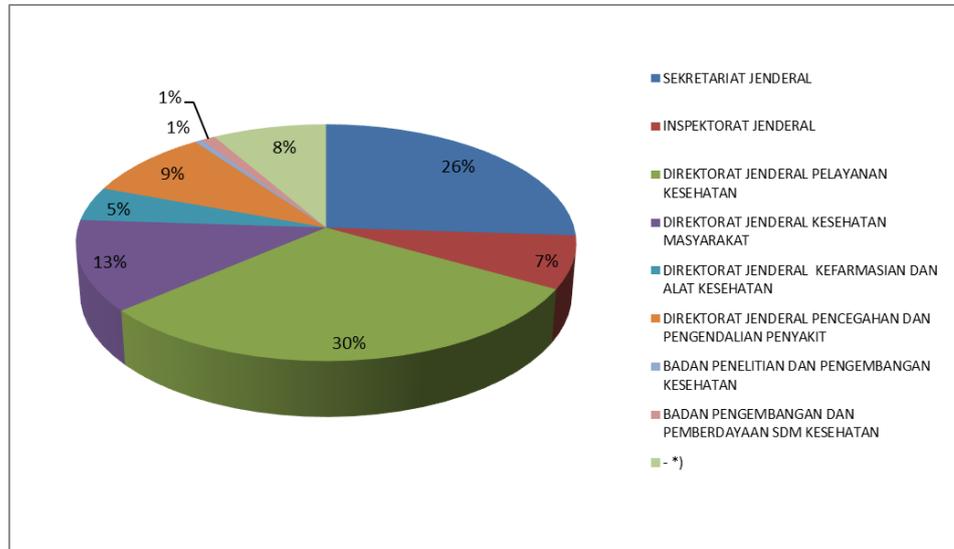
Kesehatan

Selain kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kinerja, Unit Pelayanan Kesehatan melakukan berbagai inovasi sebagai bentuk pelayanan dan eksistensi Unit Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan internal Unit dan kegiatan eksternal sebagai berikut:

a. Internal

Peran dan fungsi Unit Pelayanan Kesehatan yang paling pokok adalah melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Berikut adalah hasil analisis kunjungan berdasarkan Unit Kerja:

Grafik 3. 4 Kunjungan Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2019



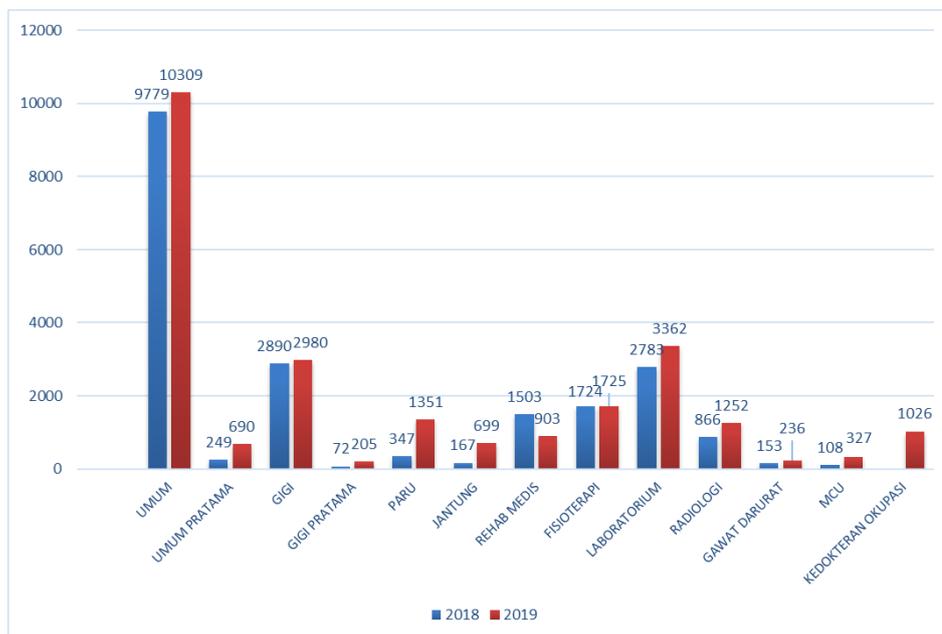
Berdasarkan grafik 3.4 terlihat bahwa kunjungan yang termasuk pada 3 teratas yaitu Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebesar 30%, Sekretariat Jenderal sebanyak 26%, dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebanyak 13%.

Jika data diatas tersebut dibandingkan dengan jumlah pegawai (<http://simka.kemkes.go.id> per 17 Januari 2020) maka didapat rata-rata per pegawai berobat dalam satu tahun adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (17 kali per tahun)
2. Sekretariat Jenderal (6 kali per tahun)
3. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (7 kali per tahun)

Kunjungan pasien selama tahun 2019 dan dibandingkan dengan tahun 2018 berdasarkan kunjungan jenis poli adalah sebagai berikut:

Grafik 3. 5 Kunjungan per Poli Tahun 2019 dan 2018



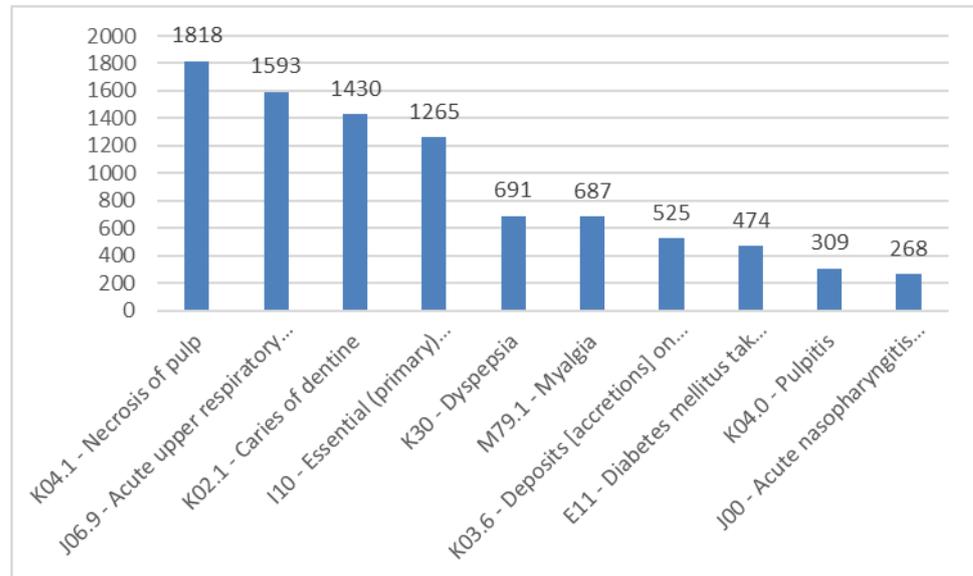
Berdasarkan grafik 3.5 terlihat bahwa sebagian besar terjadi kenaikan angka kunjungan jika dibandingkan dengan kunjungan tahun 2018, hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Klinik pratama UPK yang sudah terakreditasi
2. Pegawai Direktorat Jenderal P2P sudah pindah ke kantor pusat di Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan

Berdasarkan grafik 3.5 terlihat pula bahwa dari tahun 2018 maupun 2019 kunjungan pasien terbanyak adalah poli umum. Terjadi peningkatan kunjungan pada poli umum, laoratorium, radiologi, kedokteran okupasi, jantung, dan paru.

Jika dilihat berdasarkan jumlah penyakit terbanyak pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Grafik 3. 6 10 Penyakit Terbanyak Tahun 2019



Diagnosa 3 penyakit terbanyak berurutan di UPK yaitu nekrosis pulpa, ISPA dan karies gigi. Diagnosa penyakit didominasi oleh penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kesehatan gigi, ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas), hipertensi (tekanan darah tinggi) dan muskulo skeletal (anggota gerak tubuh)

b. Eksternal

Selain melaksanakan pelayanan kesehatan rutin, UPK juga berperan aktif dalam kegiatan promotive dan preventif, seperti:

- 1) Pemeriksaan kesehatan pengemudi bis mudik di lingkungan Kementerian Kesehatan di UPK Kemenkes, Jakarta tanggal 31 Mei 2019
- 2) Pemeriksaan Medical Check-Up kepada pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada bulan Agustus – September 2019
- 3) Pemeriksaan IVA Test dan Deteksi dini kanker Mammae bekerja sama dengan Dharma Wanita

Persatuan dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
Jakarta

- 4) Pemberian vitamin A kepada balita pegawai Kemenkes RI bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta pada bulan Februari dan Agustus 2019
- 5) Kelas Edukasi tentang Diabetes Mellitus dan Hipertensi
- 6) Tim Panitia Penyelenggara Ibadah haji (PPIH) Arab Saudi di Bidang Kesehatan.

UPK juga berfungsi sebagai tim kesehatan lapangan yang mendukung pelayanan kesehatan dalam acara di lingkungan Kementerian Kesehatan dan acara lain yang membutuhkan yaitu:

i. Dalam Negeri

- 1) Rakerkesnas di ICE BSD pada tanggal 10 – 14 Februari 2019
- 2) Penguatan Kompetensi Pegawai Biro Umum di Royal Safari Garden Resort & Convention tanggal 27 Februari – 1 Maret 2019
- 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkes di Seruni Hotel, Bogor tanggal 12 – 15 Maret 2019
- 4) Penyerahan Penetapan Kebutuhan/Formasi PNS di Lingkungan Daerah di Ruang Siwabessy tanggal 19 Maret 2019
- 5) SEAR Town Hall on Youth Engagement di Balai Kartini tanggal 20 – 21 Maret 2019
- 6) Jambore Konselor Sebaya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta tanggal 20 – 23 Maret 2019

- 7) Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran tahap I di Gudang Kementerian Kesehatan tanggal 27 Maret 2019
- 8) Peningkatan Kapasitas Dokter Dalam Pelayanan Medik Akupuntur di Hotel whyndham Casablanca tanggal 8 – 10 April 2019
- 9) Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Tahun 2020 di Hotel Novotel Jakarta tanggal 10 – 13 April 2019
- 10) Pendampingan Menteri Kesehatan dalam rangka kunjungan ke Tasikmalaya tanggal 26 – 27 Maret 2019
- 11) Tim Flying Health Care (FHC) dokter gigi di Desa Bintang Arad dan Dusun Muara Malungai, Kecamatan Gunung Bintang Awal, kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah tanggal 08 – 13 April 2019.
- 12) Kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 di Hotel Horison Bekasi tanggal 22 – 26 April 2019
- 13) Tim Flying Health Care (FHC) di Desa Pulau Noc Mulas, Puskesmas Dintor, Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai tanggal 29 April – 05 Mei 2019
- 14) Pertemuan Evaluasi Dewan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat tanggal 13 – 15 Mei 2019
- 15) Kegiatan CFD Bersama IKLUM STIA LAN di Sudirman Jakarta pada tanggal 23 Juni 2019
- 16) Tim Flying Health Care (FHC) di Desa Baruppu dan desa Parodo Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara tanggal 9 – 15 Juli 2019
- 17) Kegiatan Visi Indonesia di SICC Sentul tanggal 14 juli 2019

- 18) Penelitian dan Reviu RKa-K/L Pagu Anggaran Kantor Pusat dan Daerah Kemenkes RI di Hotel Horison Bekasi tanggal 22 – 26 Juli 2019
- 19) Pembukaan Latihan Dasar CPNS di Istora Senayan tanggal 24 Juli 2019
- 20) Workshop Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 di Hotel Rancamaya Bogor tanggal 28 – 30 Juli 2019
- 21) Dakontek DAK di Hotel Atria Serpong tanggal 29 Juli – 2 Agustus 2019
- 22) Hari Pramuka 2019 di Bumi Perkemahan Cibubur tanggal 14 Agustus 2019
- 23) Tim Penilai Lomba Klinik Pratama Sehat Tahun 2019 dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke 55 di Klinik Inka, Madiun tanggal 08 Oktober 2019
- 24) Tim Penilai Lomba Klinik Pratama Sehat Tahun 2019 dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke 55 di Klinik Mediska, Semarang tanggal 9 – 11 Oktober 2019
- 25) Lomba Futsal Hari Kesehatan Nasional di Planet Futsal, Kuningan Jakarta tanggal 22 Oktober 2019
- 26) Lomba Basket Hari Kesehatan Nasional di lapangan Basket Kementerian Kesehatan tanggal 2 – 3 November 2019
- 27) Pameran Pembangunan Kesehatan di ICE BSD tanggal 7 – 9 November 2019
- 28) Lomba Funbike dalam rangka Hari Kesehatan Nasional tanggal 10 November 2019
- 29) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2020 di Holiday Inn & Suites Jakarta tanggal 26 – 29 November 2019

- 30) Peningkatan Kapasitas ASN Kementerian Kesehatan di Balai Kartini Exhibition & Convention Center tanggal 18 November 2019
- 31) Pelatihan Emergency Kebakaran di Gedung Agro Plaza tanggal 20 Desember 2019

ii. Luar Negeri

- 1) Sosialisasi Kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia di Brunei Darussalam tanggal 6 – 9 Desember 2019
- 2) Sosialisasi Kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia di Doha, Qatar tanggal 13 - 17 Desember 2019

Keberhasilan yang telah dicapai UPK dalam mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu selaras dengan hasil akreditasi UPK yang mendapatkan akreditasi utama. Sepanjang tahun 2019 kunjungan pasien UPK meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah kunjungan pada tahun 2019 mencapai 25.065 kunjungan. Selain itu, UPK juga telah melakukan renovasi pada klinik utama dan ruang manajemen sehingga ruangan yang ada di UPK lebih nyaman dan bersih.

C. Sumber Daya

Sumber daya di Unit Pelayanan Kesehatan terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, serta sumber daya keuangan. Berikut penjabaran sumber daya yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan:

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Tenaga di Unit Pelayanan Kesehatan sampai dengan akhir Desember 2019 adalah sebanyak 41 orang yang terdiri dari 32 PNS dan 9 Non PNS, yang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Jumlah Tenaga di Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019

No	SDM	2019
1	Dokter Spesialis	
	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1
	Spesialis Paru	1
	Spesialis Rehabilitasi Medik	1
	Spesialis Kesehatan Kerja	1
2	Dokter Umum	3
3	Dokter Gigi	3
4	Perawat	6
5	Perawat Gigi	2
6	Pranata Laboratorium Kesehatan	3
7	Fisioterapis	2
8	Rekam Medik	1
9	Apoteker	1
10	Radiografer	1
11	Struktural	4
12	Administrasi	2
13	Tenaga Honorer	9
Jumlah		41

Terdapat tambahan tenaga 2 orang PNS di UPK yaitu 1 orang apoteker dan 1 orang radiografer. Tenaga Honorer yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan terdiri dari Perekam Medis, Apoteker, Bidan, Administrator Kesehatan, Arsiparis dan Pengemudi Ambulance.

Tabel 3. 12 SDM Unit Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah Pegawai	
		n	%	n	%	n	%
1	Laki-laki	3	9,4%	4	44,6%	7	17%
2	Perempuan	29	90,6%	5	55,4%	34	83%
Jumlah		32	100,0%	9	100%	41	100,0%

Berdasarkan tabel 3.12 terlihat bahwa sebagian besar pegawai Unit Pelayanan Kesehatan berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 83%.

Tabel 3. 13 SDM Unit Pelayanan Kesehatan Th.2019 berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah Pegawai	
		n	%	n	%	N	%
1.	SMA	2	6,25%	1	11,1%	3	7,3%
2.	D3	14	43,75%	3	33,3%	17	41,4%
3.	S1/D4	8	25%	5	55,6%	13	31,8%
4.	S2/Spesialis	8	25%	0	0%	8	19,5%
Jumlah		32	100%	9	100%	41	100%

Berdasarkan tabel 3.13 terlihat bahwa sebagian besar pegawai Unit Pelayanan Kesehatan memiliki tingkat pendidikan D3 yaitu sebesar 41,4% masih terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan SMA yaitu supir ambulans. Pada pegawai PNS sudah tidak ada pegawai tingkat Pendidikan SMA, namun masih terkendala terkait data yang belum update di Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sehingga data belum update.

Tabel 3. 14 SDM Unit Pelayanan Kesehatan Th.2019 berdasarkan Jabatan

No	SDM	Jumlah
1	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
3	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan	1
4	Kepala Seksi Penunjang Medik	1
5	Dokter/Dokter Gigi Utama	4
6	Dokter/Dokter Gigi Madya	6
7	Perawat/Perawat Gigi Penyelia	4
8	Perawat Pelaksana Lanjutan	2
9	Perawat Pemula	2

No	SDM	Jumlah
10	Pranata Lab Kesehatan Pelaksana	1
11	Pranata Lab Kesehatan Pemula	2
12	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	2
13	Rekam Medik Mahir	1
14	Apoteker	1
15	Radiografer Pemula	1
16	Perencana/Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
17	Pengelola Data	1
18	Tenaga Honorer	9
Jumlah		41

Dari tabel 3.14 SDM Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan Jabatan bahwa masih terdapat jabatan yang belum ada di Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes dilihat dari peta jabatan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jabatan yang belum ada dikarenakan belum ada PNS yang menduduki jabatan tersebut sehingga ada beberapa jabatan saat ini diisi oleh tenaga honorer. Jabatan yang belum ada di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah Analis Kepegawaian, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Analis Keuangan, Bendahara, Pranata Komputer, Pengelola BMN, Analis Kebijakan BMN, Administrator Kesehatan, Arsiparis, Bidan, Pengemudi Ambulans, Perencana dan Pengelola Data.

2. Sarana dan Prasarana

Laporan pengelolaan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Kesehatan selama tahun anggaran 2019 adalah :

a. BMN Intrakomtabel

Posisi Awal (per 1 Januari 2019)	: Rp.20.829.381.599
Penambahan	: Rp. 9.662.431.194
Pengurangan	: Rp. 1.416.393.000
Posisi Akhir (per 31 Desember 2019)	: Rp. 29.075.419.793

- b. BMN Ekstrakomptabel
- Posisi Awal (per 1 Januari 2019) : Rp. 20.071.580
- Penambahan : Rp. 10.654.200
- Pengurangan : Rp. 0
- Posisi Akhir (per 31 Desember 2019) : Rp. 30.725.780
- c. BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- BMN
- Posisi Awal (per 1 Januari 2019) : Rp. 20.849.453.179
- Penambahan : Rp. 9.673.085.394
- Pengurangan : Rp. 1.416.393.000
- Posisi Akhir (per 31 Desember 2019) : Rp. 29.106.145.573

Tabel 3. 15 Belanja Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2019

No	JENIS BELANJA	JUMLAH
1	Alat Kesehatan	Rp. 4.292.797.529
2	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	Rp. 77.424.300
3	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Rp. 451.862.639
4	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Rp. 369.050.000
5	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp. 66.382.800
Total		Rp. 5.477.545.628

3. Sumber Daya Keuangan

Anggaran belanja Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2019 sebesar Rp. 20.008.606.000 (Dua puluh milyar delapan juta enam ratus enam ribu rupiah). Realisasi terhadap anggaran belanja tersebut dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Tahun 2019

URAIAN	2019		
	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	5.895.758.000	5.680.036.381	96.34
Belanja Barang	6.638.944.000	6.368.355.830	95.92
Belanja Modal	7.473.904.000	7.249.841.820	97.00
	20.008.606.000	19.298.234.031	96.45

Pada tabel 3.16 terlihat bahwa realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 19.298.234.031 (Sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah). Realisasi paling kecil terdapat pada belanja barang. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran terkait belanja barang.

BAB IV

PENUTUP

Unit Pelayanan Kesehatan telah merealisasikan kinerja yang telah tertuang di dalam Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelayanan Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan selama kurun waktu satu tahun.

Indikator Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan secara umum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bisnis Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Sedangkan beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan. Terdapat tambahan 2 pegawai CPNS sebanyak 2 orang sebagai radiografer dan apoteker di Unit Pelayanan Kesehatan. Klinik Pratama UPK sudah terakreditasi dengan status utama oleh Komite Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan Nomor YM.02.01/VI.12/1/2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan selain merupakan pertanggungjawaban kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan demi peningkatan Unit Pelayanan Kesehatan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Mahsun, Mohamad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE, Yogyakarta

Pohan, Imbalo S. 2006. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan. Jakarta:EGC